

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi internasional merupakan suatu aktifitas perpindahan individu ke negara lain dengan tujuan memperoleh upah yang diinginkan. Adanya migrasi internasional kemudian mempengaruhi fenomena pekerja migran di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu sumber pekerja migran terbesar di Asia Tenggara. Minimnya ketersediaan lapangan kerja di Indonesia membuat penduduk Indonesia aktif melakukan kegiatan migrasi internasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara inti dan sekaligus untuk mengatasi kekurangan lapangan kerja di Indonesia.

Selain itu, dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia juga telah berpartisipasi dalam berbagai jasa perdagangan internasional di mana migrasi internasional merupakan salah satu moda perdagangan jasa internasional.¹ Sehingga hal tersebut kemudian menyebabkan banyak tenaga kerja Indonesia yang melakukan kegiatan migrasi dan menjadi tenaga kerja asing di negara maju.

Dalam melihat persoalan migrasi dan pembangunan, ada dua paradigma inti dalam memandang persoalan migrasi internasional menuju

¹ *Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025*. Accessed February 5, 2023. https://www.who.int/workforcealliance/countries/inidonesia_hrhplan_2011_2025.pdf.

negara tujuan atau negara berkembang.² Paradigma pertama adalah historis-fungsionalis sebagai perspektif migrasi yang optimis. Sedangkan yang kedua adalah paradigma historis-strukturalis sebagai perspektif pesimis terhadap migrasi.

Paradigma historis-strukturalis melihat migrasi sebagai pelarian dari kesengsaraan akibat ekspansi kapital global, yang secara inheren tidak mampu menyelesaikan kondisi struktural yang menyebabkan migrasi. Sebaliknya migrasi dipandang sebagai masalah keterbelakangan yang memperburuk pembangunan.

Di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis tenaga kerja Indonesia yang saat ini dikenal dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia). Kedua sektor tersebut adalah pekerja migran Indonesia profesional (sektor formal) dan pekerja migran Indonesia non-profesional (sektor informal). Tenaga kerja profesional PMI (sektor formal) adalah pekerja migran asal Indonesia yang memiliki pekerjaan atau sedang bekerja di negara lain (di luar negeri) baik di perusahaan maupun di berbagai organisasi dengan kepemilikan badan hukum yang jelas dan ketentuan mengenai kontrak kerja, serta memfasilitasi pekerjaanya, yaitu dilindungi oleh hukum yang berlaku di negara penempatan.³

² Haas, Hein de. n.d. *Migration and development A theoretical perspective*, IMI (International Migration Institute), Working papers 9, University of Oxford,. Accessed February 5, 2023. <https://www.migrationinstitute.org/publications/wp-09-08/@@download/file>.

³ Burhani, Ruslan. 2013. *TKI Formal Lebih Banyak Daripada Informal*. Accessed February 5, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/352291/tki-formal-lebih-banyak-daripada-informal>.

Sedangkan PMI (sektor informal) non-profesional atau biasa disebut dengan Asisten Rumah Tangga adalah tenaga kerja Indonesia yang memiliki pekerjaan di negara lain (luar negeri) yang digunakan oleh *single user* atau perorangan dan tidak dilindungi oleh badan hukum yang jelas, sehingga bahwa hubungan kerjasama bersifat *individual* atau pribadi dan cenderung rentan terhadap berbagai masalah.⁴

Jika dilihat dari negara tujuan, penempatan PMI banyak berada di kawasan Asia Pasifik mayoritas ke negara-negara seperti: Malaysia, Taiwan, Korea dan Brunei Darussalam.⁵ Di kawasan Asia Timur, Jepang merupakan salah satu negara maju yang saat ini menerima tenaga kerja asing di berbagai bidang tenaga kerja. Jepang merupakan negara di Asia Timur yang sering disebut sebagai “harimau Asia”. Julukan ini bukan hanya karena kekuatannya tetapi juga karena Jepang dianggap sebagai negara non-Barat pertama yang berhasil melakukan industrialisasi.

Keberhasilan ini didorong oleh kekuatan ekonomi dan kemampuan teknologi. Jepang telah membuktikan kemampuannya bersaing di tingkat internasional, bahkan mampu bersaing dengan negara-negara kuat Barat. Meskipun terdapat tantangan demografis, seperti populasi yang menua, Jepang masih dianggap sebagai negara maju dengan salah satu perekonomian terbesar di dunia. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian

⁴ *Ibid.*

⁵ Syafina, Dea Chadiza. 2018. *Ke Mana Mengalirnya Guyuran Devisa Para Pekerja Migran*. Accessed February 5, 2023. <https://tirto.id/ke-mana-mengalirnya-guyuran-devisa-para-pekerja-migran-cJNw>.

Jepang, permasalahan demografis yang dihadapi Jepang saat ini menjadi kendala bagi perekonomian Jepang di masa mendatang.

Masalah demografis yang dialami Jepang adalah kekurangan tenaga kerja dan *aging population* atau penduduk yang menua. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah Jepang melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitasnya melalui inovasi teknologi, seperti meningkatkan partisipasi perempuan dan pekerja lanjut usia di lingkungan kerja.

Namun upaya tersebut belum terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut karena persentase kecelakaan kerja diperkirakan terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama dengan semakin banyaknya pekerja yang kurang produktif dan menghasilkan produk dengan kualitas yang kurang optimal. Di sektor lain yaitu sektor kesehatan, pemerintah Jepang juga menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja. Hal ini menjadi perhatian khusus karena populasi lansia yang membutuhkan bantuan dan perhatian khusus semakin meningkat.

Selain itu, minimnya jumlah pekerja usia produktif dan rendahnya minat pekerja lokal untuk bekerja di bidang kesehatan juga menjadi permasalahan serius. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Jepang telah mengambil langkah untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja migran di bidang kesehatan. Dengan demikian, para pekerja migran mempunyai

kesempatan untuk bekerja di Jepang dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja di bidang kesehatan negara tersebut.

Berdasarkan jenis sektor pekerjaan PMI, Jepang merupakan salah satu negara maju bagi Pekerja Migran Indonesia di sektor formal. Kebijakan luar negeri yang dirumuskan pemerintah Jepang didasarkan pada beberapa faktor pendukung, baik faktor eksternal maupun internal. Dalam konteks faktor eksternal, pemerintah Jepang berupaya merumuskan kebijakan luar negeri melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi. Melalui perjanjian ini, pemerintah berharap dapat membangun hubungan dan kerjasama yang saling bergantung, di mana kedua belah pihak saling memperoleh manfaat.

Sedangkan dari segi faktor internal, terdapat tekanan yang datang dari masyarakat Jepang sendiri. Hal ini terkait dengan penurunan angka kelahiran dan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Tanah Air. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan ekonomi dan industri di Jepang.

Menyikapi faktor tersebut, pemerintah Jepang memutuskan untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang fokus pada kerjasama di bidang ekonomi. Keputusan ini didasarkan pada kemakmuran ekonomi yang telah dicapai Jepang, dan negara tersebut berkomitmen untuk berbagi manfaat kemajuan ekonominya dengan mitra internasional melalui kerjasama ekonomi.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, pasar tenaga kerja Jepang mengalami perubahan yang signifikan karena secara tidak langsung membuka peluang bagi pekerja migran untuk mengembangkan karirnya di Jepang, khususnya di bidang kesehatan. Namun kenyataannya, meskipun Jepang dikenal sebagai negara maju dalam bidang ekonomi dan industri, jumlah pekerja migran yang bekerja di sana relatif sedikit. Hal ini disebabkan oleh tingginya kekhawatiran penduduk asli Jepang bahwa terlalu banyak pekerja migran dapat mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan nilai pasar tenaga kerja di Jepang.

Selain itu, dari segi budaya, masyarakat Jepang cenderung tertutup terhadap masuknya budaya baru ke negaranya. Mereka khawatir budaya asing dapat merusak dan menurunkan nilai-nilai budaya tradisional Jepang yang mereka pelihara. Di sisi lain, terutama dari sudut pandang Indonesia yang merupakan salah satu mitra Jepang dalam kerjasama jangka panjang, melihat bahwa kebijakan baru ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perdagangan yang lebih baik, serta berdampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) atau yang saat ini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikirim ke Jepang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002, penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta mengembangkan kesejahteraan pekerja. kualitas sumber daya manusia. Hal ini dilakukan

dengan memanfaatkan pasar tenaga kerja internasional dengan meningkatkan kualifikasi pekerja dan memberikan perlindungan yang optimal, baik sebelum keberangkatan, selama masa kerja, dan setelah kembali ke Indonesia.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara maju seperti Jepang dilakukan atas dasar tingginya permintaan dari negara tujuan, terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, serta janji gaji menarik dan fasilitas yang ditawarkan negara penerima PMI. Hal ini merupakan poin sentral dalam program nasional yang dirancang oleh pemerintah Indonesia. Meski tidak mudah memasuki pasar tenaga kerja di Jepang, Indonesia mempunyai peluang lebih besar untuk mengirimkan PMI karena sejumlah program ketenagakerjaan yang sudah ada sejak lama.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat untuk menyusun perjanjian kerjasama ekonomi bilateral yang kemudian dikenal dengan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Tujuan pembentukan kerangka kerjasama Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan di bidang ekonomi antara kedua belah pihak melalui kegiatan pasar bebas barang, jasa dan fasilitas, serta investasi dan kerjasama di bidang ekonomi.

IJEPA diresmikan oleh pemerintah Jepang dan dengan mengajukan proposal mengenai pendirian IJEPA yang diwakili oleh Junichiro Koizumi selaku Perdana Menteri Jepang yang saat itu menjelaskan kepada Presiden

Indonesia saat itu yaitu Megawati yang diusung keluar saat Presiden Megawati berkunjung ke Tokyo pada 22 - 25 Juni tepatnya 2003 silam.⁶

Setelah melalui beberapa kali perundingan, IJEPA diberlakukan dan dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Juli 2008. Melalui pembentukan IJEPA, Indonesia telah memanfaatkan IJEPA sejak tahun 2008, yaitu pemerintah Indonesia secara resmi melakukan kerjasama *g to g* (*government to government*).

Sebagai negara yang memiliki tingkat pengembangan yang tinggi, Jepang seringkali membutuhkan tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Salah satu negara asal pekerja migran yang kerap bekerjasama dengan pemerintah Jepang adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Jepang bekerjasama dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia di Jepang melalui visa SSW (*Specified Skilled Worker*).⁷

Program visa SSW diluncurkan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk memperluas akses bagi pekerja asing yang berpendidikan dan berpengalaman untuk bekerja di Jepang. Program ini mencakup berbagai bidang pekerjaan seperti konstruksi, industri manufaktur, perhotelan, dan perawatan kesehatan. Kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam program ini bertujuan

⁶ Rahmah, Nuthaila. 2017. "Hubungan Indonesia – Jepang dalam Perjanjian Indonesia-Japan Economic partnership Agreement di bidang Pertanian." *Skripsi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial & Politik. Universitas Hasanuddin.*

⁷ 2019. "New visa category to admit more foreign workers to Japan". *The Japan Times*. Accessed February 5, 2023. japantimes.co.jp/.

untuk membantu pekerja migran Indonesia memperoleh pekerjaan yang layak dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Pemerintah Indonesia memfasilitasi proses rekrutmen dan seleksi bagi calon pekerja migran, serta memberikan bantuan kepada pekerja migran yang berada di Jepang untuk mengatasi berbagai masalah seperti masalah kesejahteraan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, meskipun program visa SSW memberikan kesempatan bagi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Jepang, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran.

Dinamika kerjasama Indonesia dan Jepang dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia terampil di Jepang melalui program *Specified Skilled Worker* merupakan hasil dari berbagai interaksi faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal kebutuhan ekonomi, Jepang menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil di beberapa sektor utama, seperti layanan kesehatan, manufaktur, pertanian dan konstruksi. Kebutuhan ini mendorong pemerintah Jepang untuk mencari pekerja migran dari negara mitra, termasuk Indonesia.

Dari aspek kerjasama bilateral, Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang kuat di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan investasi. Kolaborasi ini menjadi dasar yang baik bagi pengembangan program Pekerja Berketerampilan Spesifik. Dari aspek pendidikan dan pelatihan pra-kerja di Indonesia dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan pra-kerja yang

difokuskan pada keterampilan yang dibutuhkan di Jepang untuk memenuhi persyaratan program Pekerja Berketerampilan Spesifik. Hal ini mencakup pemberian pelatihan teknis dan bahasa Jepang.

Dalam hal ini, agen penempatan kerja berperan penting dalam memfasilitasi proses seleksi, persiapan dan penempatan pekerja migran. Namun, terdapat tantangan terkait kejujuran dan transparansi dalam praktik lembaga-lembaga tersebut. Dari aspek pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran, perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran menjadi perhatian utama. Pemerintah Indonesia dan Jepang harus bekerjasama untuk memastikan pekerja migran mendapatkan hak-hak mereka, seperti upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Dari aspek bahasa dan budaya, pekerja migran harus mengatasi tantangan bahasa dan budaya ketika tiba di Jepang. Pemerintah Jepang dan Indonesia dapat memfasilitasi pelatihan budaya dan bahasa yang lebih baik untuk memudahkan integrasi mereka ke dalam dunia kerja. Setelah masa kerjanya berakhir di Jepang, para pekerja migran kembali ke Indonesia dengan membawa keterampilan dan pengetahuan baru. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, serta berpotensi mentransfer keterampilan kepada masyarakat lokal.

Dalam hal tantangan regulasi dan kebijakan, perbedaan peraturan kerja, imigrasi, dan perlindungan sosial antara Indonesia dan Jepang dapat

menjadi kendala yang perlu diatasi. Harmonisasi kebijakan dapat memudahkan proses penempatan. Selain dari aspek kesadaran sosial, masyarakat Jepang perlu menerima kehadiran pekerja migran sebagai kontributor penting bagi perekonomian dan masyarakat mereka. Kampanye kesadaran sosial dapat membantu mengatasi stigmatisasi dan diskriminasi.

Dalam semua dinamika tersebut, penting bagi Indonesia dan Jepang untuk menjaga komunikasi terbuka, bekerjasama dalam pemantauan dan perlindungan pekerja migran, serta mengatasi hambatan yang mungkin timbul selama implementasi program Pekerja Berketerampilan Spesifik. Pemerintah Indonesia dan Jepang harus terus bekerjasama untuk memastikan bahwa pekerja migran memperoleh perlakuan yang adil dan hak-hak mereka dilindungi.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penduduk yang menua (*aging population*) yang menyebabkan berkurangnya tenaga kerja terampil di Jepang. Menyikapi situasi tersebut, Jepang telah mengambil langkah untuk membuka lapangan kerja bagi pekerja migran di berbagai sektor.

⁸ 2019. "Indonesia and Japan Cooperate in Placing Indonesian Migrant Workers in Japan". *The Jakarta Post*. Accessed February 5, 2023. [thejakartapost.com/news/2019/10/22/indonesia-and-japan-cooperate-in-placing-indonesian-migrant-workers-in-japan.html](https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/22/indonesia-and-japan-cooperate-in-placing-indonesian-migrant-workers-in-japan.html).

Dengan demikian, para pekerja migran mempunyai kesempatan untuk bekerja di Jepang dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor yang dibutuhkan negara tersebut. Selain itu, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tinggi di tengah banyaknya usia produktif kerja namun keterbatasan lapangan kerja yang kurang.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama untuk membuat program penempatan PMI terampil. Dari kerjasama Indonesia dan Jepang tersebut menghadirkan visa SSW sebagai program penempatan PMI terampil di Jepang. Maka dari itu, inti dari pertanyaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana kerjasama Indonesia dan Jepang dalam penempatan PMI terampil di Jepang ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Jepang dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia terampil di Jepang. Selain itu, juga untuk mengetahui latar belakang Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang serta keuntungan apa yang diperoleh Jepang dari kerjasama ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan sekaligus bahan tinjauan bagi pemerintah mengenai apakah kerjasama ekonomi yang dijalin dengan Jepang ini.

2. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan tentang kerjasama dan sebagai syarat kelulusan sarjana Hubungan Internasional.

3. Bagi Universitas Nasional

Untuk menambah bahan bacaan hasil penelitian, khususnya mengenai kerjasama penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil di Jepang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis yang akan dibuat terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi karya tulis diawali dengan latar belakang masalah mengenai apa yang menjadi alasan memilih judul, kemudian terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup penjelasan atas teori yang digunakan dalam penelitian ini dan perbandingannya dengan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data serta kredibilitas

BAB IV PROGRAM KERJASAMA INDONESIA DAN JEPANG TERKAIT REKRUTMEN PMI DI JEPANG

Pada bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian yang akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.

BAB V PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE JEPANG DENGAN PROGRAM SSW

Pada bab ini berisi hasil dari pembahasan atau analisis yang berisi Bagaimana kerjasama Indonesia dan Jepang dalam penempatan PMI terampil di Jepang.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penulis.